



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 (LKjIP)

Jl. Panglima Sudirman No.12 Pati Kode Pos 59113
Telp. (0295)-381932 <http://dkp.patikab.go.id>

KATA PENGANTAR

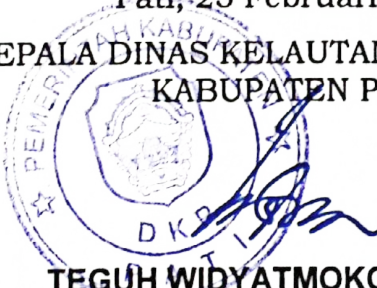
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 dapat diselesaikan.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati secara garis besar meliputi: Profil Instansi, Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (Uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan).

Tujuan LKjIP secara umum adalah untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sekaligus juga melaporkan kinerja instansi yang menjadi tolok ukur tanggungjawab suatu instansi.

Dengan LKjIP tersebut akan diketahui perkembangan dari tahun ke tahun tentang pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, progam dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pati, 25 Februari 2025
Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI

TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197605281994121002

D A F T A R I S I

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Data Umum Organisasi | 2 |
| 1.3 Struktur Organisasi | 3 |
| 1.4 Tantangan dan Peluang | 14 |
| 1.5 Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akip Tahun Sebelumnya | 19 |
| 1.6 Sistematika Penyajian LKjIP | 23 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 25 |
| 2.1 Rencana Strategis (Renstra) | 25 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 26 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 29 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 29 |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja | 29 |
| 3.3. Hambatan dan Rencana Aksi | 45 |
| 3.4. Realisasi Anggaran | 47 |
| 3.5. Inovasi dan Prestasi | 50 |
| BAB IV P E N U T U P | 52 |

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 2024

DAFTAR TABEL

| | <i>Halaman</i> |
|---|----------------|
| Tabel 1.1 Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024 | 10 |
| Tabel 1.2 Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024 | 10 |
| Tabel 1.3 Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024 | 11 |
| Tabel 1.4 Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan Tahun 2024 | 11 |
| Tabel 1.5 Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2024 | 11 |
| Tabel 1.6 Jumlah THL DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024 | 12 |
| Tabel 1.7 Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan | 12 |
| Tabel 1.8 Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan | 16 |
| Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 | 27 |
| Tabel 2.2 Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 | 28 |
| Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 | 30 |
| Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 | 31 |
| Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 | 33 |
| Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 | 36 |
| Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 | 37 |
| Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 | 38 |

Tabel 3.7 Data Series Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020 s.d 2024 39

Tabel 3.8 Perbandingan Hasil Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 40

Tabel 3.9 Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 47

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerjanya.

Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati kedepan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat. Hal ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Itulah sebabnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menetapkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut :

1. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

- a. *Meningkatnya Produksi Perikanan*

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator pertumbuhan produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

b. Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator Pertumbuhan Angka Konsumsi Makan Ikan

2. Sasaran jangka menengah yang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

- a. *Meningkatnya produksi perikanan tangkap* dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan tangkap.
- b. *Meningkatnya produksi perikanan budidaya* dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan budidaya.
- c. *Meningkatnya produksi hasil olahan ikan* dengan indikator pertumbuhan produksi hasil olahan ikan

Secara global hasil pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka pada Tahun 2024 ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati menunjukkan capaian kualitatif sebesar 827,54%. Hasil ini telah mencapai target sasaran tahun yang telah ditetapkan pada Renstra, meskipun masih dijumpai adanya beberapa kendala dan kelemahan yang masih memerlukan peningkatan serta perbaikan di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 17.277.916.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.305.984.999,00 (enam belas milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94,37%.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 dapat diselesaikan.

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati secara garis besar meliputi: Profil Instansi, Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja (Uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan).

Tujuan LKjIP secara umum adalah untuk melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sekaligus juga melaporkan kinerja instansi yang menjadi tolok ukur tanggungjawab suatu instansi.

Dengan LKjIP tersebut akan diketahui perkembangan dari tahun ke tahun tentang pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati selama satu tahun sehingga dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pati, 25 Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI



TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 197605281994121002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan baik dari anggaran APBD maupun APBN. Capaian kinerja ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders. Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/ amanah. Dengan demikian LKjIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKjIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LKjIP ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan,

- efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuan mengimplementasikan SAKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap Penetapan perencanaan strategi, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

1.2 Data Umum Organisasi

1.2.1 Dasar Hukum

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dijabarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
4. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
- g. UPTD.

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing unsur dalam Organisasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai pelaksanaan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbagian Perencanaan dan Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan perencanaan dan program, keuangan dan administrasi umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- f. menyusun rencana strategis Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
- h. menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan.

Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, pengembangan usaha, pemberdayaan kenelayanan, pengawasan, perlindungan kenelayanan dan sumber daya ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan serta pengelolaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan.

Bidang Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudi daya ikan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha pembudidaya ikan,

pengelolaan kesehatan dan lingkungan pembudidayaan ikan, pengembangan sarana dan prasarana pembudidaya ikan; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut dan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan.

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan perikanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan pengembangan sarana prasarana Tempat Pelelangan Ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kelompok jabatan fungsional

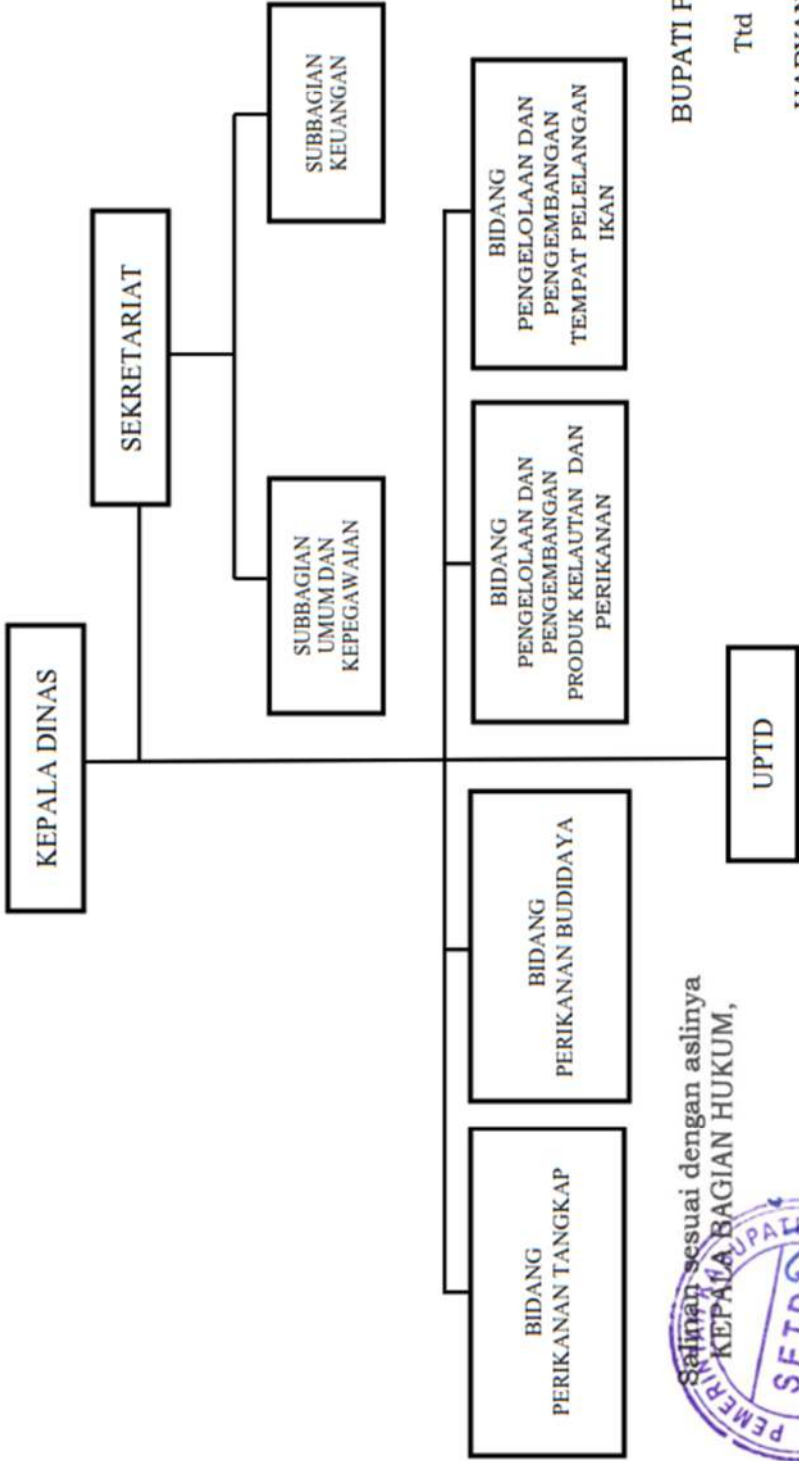
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. UPTD

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat dilihat di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI PATI,
Ttd
HARYANTO

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 43 orang personel (data sampai Desember 2024), terdiri atas 28 orang laki-laki dan 16 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut berikut :

Jumlah PNS : 45 orang, terdiri dari :

- 1. Pejabat Struktural : 8 orang
- 2. Fungsional Umum/ Staf : 37 orang

Sebagai gambaran, berikut data terpilah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 dengan total jumlah ASN sebanyak 44 orang dan Tenaga Honorer Daerah (THD) sebanyak 136 orang.

Tabel 1.1. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|-----------|
| Laki - laki | 28 |
| Perempuan | 16 |
| Total | 44 |

Tabel 1.2. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024

| Jenis Jabatan | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| Jabatan Fungsional | 5 | 3 | 8 |
| Jabatan Pelaksana | 18 | 9 | 27 |
| Jabatan Struktural | 5 | 4 | 9 |
| Total | 30 | 16 | 44 |

Tabel 1.3. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan Tahun 2024

| Golongan Jabatan | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------------------------|-------------|-----------|--------|
| II/b - Pengatur Muda Tingkat I | 0 | 0 | 0 |
| II/c - Pengatur | 11 | 0 | 11 |
| II/d - Pengatur Tingkat I | 3 | 0 | 3 |
| III/a - Penata Muda | 3 | 4 | 7 |
| III/b - Penata Muda Tingkat I | 1 | 1 | 2 |
| III/c - Penata | 0 | 3 | 3 |
| III/d - Penata Tingkat I | 5 | 5 | 10 |
| IV/a - Pembina | 3 | 3 | 6 |
| IV/b - Pembina Tingkat I | 1 | 0 | 1 |
| IV/c - Pembina Utama Muda | 1 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 16 | 44 |

Tabel 1.4. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan Tahun 2024

| Jenjang Pendidikan | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|--------------------|-------------|-----------|--------|
| SLTA | 14 | 3 | 17 |
| D-III | 1 | 0 | 1 |
| S-1 | 9 | 8 | 17 |
| S-2 | 4 | 4 | 8 |
| S-3 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 27 | 16 | 44 |

Tabel 1.5. Jumlah ASN DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja Tahun 2024

| Unit Kerja | Laki - laki | Perempuan | Jumlah |
|--|-------------|-----------|--------|
| Kepala Dinas | 1 | | 1 |
| Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan | 3 | 3 | 6 |
| Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan | 11 | 0 | 11 |
| Perikanan Tangkap | 1 | 2 | 3 |
| Perikanan Budidaya | 4 | 3 | 7 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Balai Besar Budidaya Ikan (UPTD) | 1 | 1 | 2 |
| Sekretariat | 7 | 7 | 14 |
| Total | 28 | 16 | 44 |

Tabel 1.6. Jumlah THL DKP Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|------------|
| Laki - laki | 117 |
| Perempuan | 19 |
| Total | 136 |

Tenaga harian lepas berjumlah 136 orang terdiri dari 28 orang tenaga harian lepas kantor, 101 tenaga harian lepas TPI dan 7 orang tenaga harian lepas BBI dan Tambak Dinas. Selain itu juga didukung adanya jabatan fungsional yaitu Penyuluh Perikanan sebanyak 15 orang dan 12 orang Penyuluh Perikanan Bantu yang merupakan pegawai pusat. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditunjang dengan kelengkapan prasarana yang meliputi: Gedung Kantor 1 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 3 unit, TPI/PPI 8 unit, Pos Pelayanan Ikan Terpadu 1 unit, dan Tempat Penanganan Hasil Ikan 1 unit.

Disamping sumber daya manusia, sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), peralatan kantor (komputer, printer, LCD projector, lemari arsip, meja-kursi kantor, dll) dan aset tidak bergerak meliputi tanah, gedung perkantoran/bangunan. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Kelautan sebagaimana tabel 1.7 dan tabel 1.8 berikut ini.

Tabel 1.7
Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

| No. | Uraian | Jumlah | Satuan | Ket. |
|-----------|---------------------------------------|--------|--------|------|
| I. | Sarana dan Prasarana Mobilitas | | | |
| 1 | KMB roda 6 | 1 | Unit | |
| 2 | KMB roda 4 | 11 | Unit | |
| 3 | KMB roda 2 | 60 | Unit | |
| | | | | |

| No. | Uraian | Jumlah | Satuan | Ket. |
|------------|--|--------|--------|------|
| II. | Perlengkapan Kantor dan Meubelair | | | |
| 1. | Tractor Lainnya | 2 | Unit | |
| 2. | Clawer Excavator | 2 | Unit | |
| 3. | Portable Genereting Set | 3 | Unit | |
| 4. | Stationary Genereting Set | 4 | Unit | |
| 5. | Transportable Water Pomp | 1 | Unit | |
| 6. | Portable Water Pump | 14 | Unit | |
| 7. | Stationary Water Pump | 2 | Unit | |
| 8. | Sumersible Pump | 2 | Unit | |
| 9. | Pompa Lainnya | 2 | Unit | |
| 10. | Alat angkutan darat bermotor lainnya | 1 | Unit | |
| 11. | PH Meter | 4 | Unit | |
| 12. | Global Positioning System | 1 | Unit | |
| 13. | Alat Ukur Lainnya | 1 | Unit | |
| 14. | Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg | 13 | Unit | |
| 15. | Alat timbangan/biara lainnya | 7 | Unit | |
| 16. | Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya | 1 | Unit | |
| 17. | Alat Laboratorium Lainnya | 9 | Unit | |
| 18. | Mesin Ketik Manual Portable | 3 | Unit | |
| 19. | Mesin Ketik Manual Standar | 2 | Unit | |
| 20. | Mesin Hitung Uang | 3 | Unit | |
| 21. | Lemari Besi/metal | 11 | Unit | |
| 22. | Lemari Kayu | 67 | Unit | |
| 23. | Rak Besi | 7 | Unit | |
| 24. | Rak Kayu | 4 | Unit | |
| 25. | Filling Cabinet Besi | 21 | Unit | |
| 26. | Rotary Filling | 16 | Unit | |
| 27. | Brandkas | 2 | Unit | |
| 28. | CTV | 32 | Unit | |
| 29. | Papan Visual | 1 | Unit | |
| 30. | White Board | 3 | Unit | |
| 31. | Alat Penghancur Kertas | 1 | Unit | |
| 32. | Mesin Absensi | 12 | Unit | |
| 33. | Papan Nama Instansi | 3 | Unit | |
| 34. | Papan Pengumuman | 7 | Unit | |
| 35. | Papan Tulis | 6 | Unit | |
| 36. | Alat Kantor Lainnya | 58 | Unit | |

| No. | Uraian | Jumlah | Satuan | Ket. |
|-----|-------------------------------|--------|--------|------|
| 37 | Meja Kerja Kayu | 27 | Unit | |
| 38 | Kursi Besi/Metal | 1 | Unit | |
| 39 | Kursi Kayu | 83 | Unit | |
| 40 | Meja Rapat | 28 | Unit | |
| 41 | Tempat Tidur Kayu | 3 | Unit | |
| 42 | Meja Resepsionis | 1 | Unit | |
| 43 | Meja Panjang | 4 | Unit | |
| 44 | Meja ½ Biro | 100 | Unit | |
| 45 | Kursi Rapat | 52 | Unit | |
| 46 | Kursi Putar | 15 | Unit | |
| 47 | Kursi Lipat | 78 | Unit | |
| 48 | Meja Komputer | 10 | Unit | |
| 49 | Sofa | 5 | Unit | |
| 50 | Meubeleur lainnya | 54 | Unit | |
| 51 | Mesin Potong Rumput | 3 | Unit | |
| 52 | Lemari Es | 4 | Unit | |
| 53 | AC Window | 2 | Unit | |
| 54 | AC Split | 28 | Unit | |
| 55 | Kipas Angin | 6 | Unit | |
| 56 | Alat Pendingin lainnya | 1 | Unit | |
| 57 | Kompore Gas | 1 | Unit | |
| 58 | Alat Dapur Lainnya | 1 | Unit | |
| 59 | Televisi | 8 | Unit | |
| 60 | Amplifiler | 7 | Unit | |
| 61 | Sound System | 39 | Unit | |
| 62 | Wireless | 2 | Unit | |
| 63 | Michropone | 4 | Unit | |
| 64 | Megaphone | 2 | Unit | |
| 65 | Unit Power Supply | 5 | Unit | |
| 66 | Dispenser | 1 | Unit | |
| 67 | Mimbar/Podium | 1 | Unit | |
| 68 | Handy Cam | 1 | Unit | |
| 69 | Alat Rumah Tangga Lain – Lain | 69 | Unit | |
| 70 | Alat Pemadam/Portable | 7 | Unit | |
| 71 | Pompa Kebakaran/Portable | 2 | Unit | |
| 72 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 7 | Unit | |
| 73 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 15 | Unit | |
| 74 | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 1 | Unit | |

| No. | Uraian | Jumlah | Satuan | Ket. |
|-----|--|--------|--------|------|
| 75 | Meja Tamu Biasa | 14 | Unit | |
| 76 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | Unit | |
| 77 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 1 | Unit | |
| 78 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 10 | Unit | |
| 79 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 12 | Unit | |
| 80 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | 2 | Unit | |
| 81 | Microphone/Wireless MIC | 6 | Unit | |
| 82 | UPS | 10 | Unit | |
| 83 | Peralatan Studio Audio lainnya | 34 | Unit | |
| 84 | Camera Elektronik | 1 | Unit | |
| 85 | Telephone (PABX) | 1 | Unit | |
| 86 | Telephone Mobile | 4 | Unit | |
| 87 | Handy Talky | 6 | Unit | |
| 88 | Faximile | 1 | Unit | |
| 89 | Tensimeter | 1 | Unit | |
| 90 | Timbangan Badan | 1 | Unit | |
| 91 | Alat Kedokteran umum lainnya | 2 | Unit | |
| 92 | Timbangan Elektronik | 1 | Unit | |
| 93 | Autoclave (alat laboratorium umum) | 1 | Unit | |
| 94 | Thermometer (alat laboratorium umum) | 19 | Unit | |
| 95 | Binocular Microscope (alat lab microbiologi) | 2 | Unit | |
| 96 | Microscope Binocular | 3 | Unit | |
| 97 | Analitical Balance (alat lab. microbiologi) | 1 | Unit | |
| 98 | Alat laboratorium microbiologi lainnya | 10 | Unit | |
| 99 | DO Meter | 3 | Unit | |
| 100 | Alat laboratorium kualitas air & tanah lainnya | 8 | Unit | |
| 101 | Alat laboratorium penunjang lainnya | 2 | Unit | |
| 102 | PC Unit | 23 | Unit | |
| 103 | Lap Top | 33 | Unit | |
| 104 | Note Book | 18 | Unit | |
| 105 | Printer | 26 | Unit | |
| 106 | Scanner | 2 | Unit | |

| No. | Uraian | Jumlah | Satuan | Ket. |
|-----|----------------------------|--------------|-------------|------|
| 107 | Router | 1 | Unit | |
| 108 | Peralatan jaringan lainnya | 3 | Unit | |
| | JUMLAH | 1.338 | Unit | |

Tabel 1.8
Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Nama Tanah/ Bangunan | Luas Tanah (m ²) | Luas Bangunan (m ²) | Ket |
|----|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1.479 | 817 | |
| 2 | TPI Juwana Unit I | 6.463 | 2.325 | |
| 3 | TPI Juwana Unit II | 40.000 | 3.680 | |
| 4 | TPI Banyutowo | 2.351 | 2.351 | |
| 5 | TPI Puncel | 420 | 214 | |
| 6 | TPI Sambiroto | 506 | 132 | |
| 7 | TPI Margomulyo | 271 | 84 | |
| 8 | TPI Pecangaan | 300 | 275 | |
| 9 | TPI Alasdowo | 120 | 72 | |
| 10 | BBI Brati | 14.180 | 639 | |
| 11 | BBI Sukolilo | 11.000 | 107,75 | |
| 12 | BBI Tlogowungu | 19.789 | 178 | |
| 13 | Tambak Dinas Margomulyo | 4.500 | 36 | Bangunan gudang |
| 14 | Tambak Dinas Dororejo | 4.100 | 81 | Bangunan Handling splis |
| 15 | Laboratorium POSIKANDU | - | 54 | Berada di lahan tambak dinas Dororejo |

Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan

- Luas Wilayah Kawasan Pesisir : 37.943 Ha
- Jumlah Kecamatan Kawasan Pesisir : 7 kec.
- Jumlah Desa Kawasan Pesisir : 136 desa
- Panjang Pantai : 60 km
- Luas Tambak Garam : 2.901.62 Ha

- Luas Potensi Mangrove : 8.906.352 Ha
- Terumbu Karang Buatan
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
 - Pantai Desa Lengkong : 450 m²
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
- Rumpon Pantai Banyutowo : 4.400 m²
- Kelompok Pembudidaya Garam
 - Jumlah Kelompok PUGAR : 928 kelompok
 - Jumlah Kecamatan : 4 kec.
 - Jumlah Desa : 21 desa
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)
 - Berbadan Hukum : 135 KUB
 - KUB BH Kemenkumham : 32 KUB
 - KUB BH Notaris : 40 KUB
- Koperasi Nelayan Berbadan Hukum : 8

Peran seperti tersebut di atas secara umum telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan hasil yang baik karena keberhasilannya dalam penerapan manajemen instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi secara efisien. Strategi yang menyeluruh dengan memperhatikan seluruh faktor di lingkungan internal maupun eksternal dibutuhkan untuk pencapaian sasaran dan tujuan.

Sebagai proses penetapan keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik, strategi merupakan perwujudan dari koordinasi dalam impelementasi kegiatan-kegiatan tersebut. Koordinasi dan komunikasi akan mencairkan kebekuan dan kebuntuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang kompleks. Implementasi koordinasi menjadi lebih sulit dengan adanya ego sektoral, prioritas alokasi sumberdaya dan lain-lain.

Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan penguasaan informasi yang

seimbang, pihak-pihak yang terkait dengan organisasi dapat mengambil keputusan yang wajar.

Penyampaian informasi secara tertulis, periodik dan melembaga mutlak diperlukan sebagai wujud pertanggung jawaban Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati dalam mengungkapkan dan mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan latar belakang tersebut di atas, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

1.4 Tantangan dan Peluang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

1. Tantangan

Berdasarkan profil perikanan didapatkan gambaran bahwa terdapat peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Adapun tantangan dalam pelayanan adalah:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan;
- b) Kurangnya nilai tambah produk pengolahan ikan;
- c) Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
- d) Keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan;
- e) Tingginya harga pakan ikan;
- f) Rendahnya harga garam rakyat dibanding garam industri;

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Promosi GEMARIKAN;
- b. Berkembangnya industri perikanan;
- c. Dukungan permodalan dalam bentuk kredit lunak dan pola kemitraan;
- d. Berkembangnya Gerakan Cinta Lingkungan;
- e. Berkembangnya teknologi pergaraman;
- f. Pembangunan gudang garam dan koperasi garam.

Berdasarkan peluang dan tantangan pengembangan di Kabupaten Pati dapat dirumuskan dalam suatu isu strategis. Isu strategis merupakan permasalahan berisi gabungan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama.

Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar ataupun sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Merujuk pada Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam mengelola potensi kelautan dan perikanan yang besar serta amanah mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat, maka isu strategis yang dirumuskan adalah:

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya
2. Peningkatan angka konsumsi makan ikan
3. Peningkatan nilai tambah produk pengolahan ikan
4. Peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
5. Penerapan teknologi usaha Kelautan dan Perikanan

1.5 Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu

dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, setiap komponen disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.9
Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan

| No | Komponen | Bobot | | Nilai | |
|----|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30% | 30% | 28,50 | 26,10 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30% | 30% | 21,00 | 23,70 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15% | 15% | 10,80 | 10,80 |
| 4 | Evaluasi Internal | 25% | 25% | 18,75 | 18,50 |
| | Nilai Hasil evaluasi | 100 | 100 | 79,05 | 79,10 |
| | Peringkat | | | BB | BB |

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja sebagai berikut :

1) Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,10 dari nilai maksimal 30,00, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Dokumen Perencanaan kinerja Hasil evaluasi atas Pemenuhan Dokumen Perencanaan kinerja menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 5,40 dari nilai maksimal 6,00.
- b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Hasil evaluasi atas hal

tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 7,20 dari nilai maksimal 9,00.

- Dalam target Renstra 2023-2026, terdapat target yang stagnan dalam 2 tahun yaitu pada tujuan Meningkatnya Konsumsi Makanan dengan indikator tujuan yaitu Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (AKI). Tertulis Target Pertumbuhan AKI pada tahun 2023-2024 sebesar 1,8% dan tahun 2025-2026 sebesar 1,9%. Seharusnya target dapat meningkat setiap tahun, tidak stagnan.
- c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 13,50 dari nilai maksimal 15,00.

2) Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar 23,70 dari nilai maksimal 30,00, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan
Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 5,40 dari nilai maksimal 6,00.
 - Indikator kinerja belum dilengkapi formulasi perhitungan dan sumber data sehingga indikator kinerja belum dapat menggambarkan keandalan data kinerja dalam mengawal pencapaian kinerja.
- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 6,30 dari nilai maksimal 9,00.
- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 12,00 dari nilai maksimal 15,00.

3) Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 10,80 dari nilai maksimal 15,00, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 2,40 dari nilai maksimal 3,00.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 3,15 dari nilai maksimal 4,50.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 5,25 dari nilai maksimal 7,50.

4) Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar 18,50 dari nilai maksimal 25,00, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 4,50 dari nilai maksimal 5,00.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 5,25 dari nilai maksimal 7,50.
- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
Hasil evaluasi atas hal tersebut menunjukkan bahwa telah memperoleh nilai 8,75 dari nilai maksimal 12,50.

- Laporan Capaian Kinerja Triwulan untuk dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja belum disusun secara tertib dan dikirimkan tepat waktu ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Rekomendasi yang diberikan agar dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa target yang ditetapkan pada indikator kinerja dalam sasaran strategi merupakan target yang menantang dan dapat dicapai, yaitu adanya peningkatan target yang akan dicapai setiap tahun sehingga dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik;
- 2) Memastikan setiap indikator kinerja memiliki definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan dan spesifik terhadap kinerja yang akan dicapai sehingga setiap data kinerja andal dalam menggambarkan pencapaian kinerja;
- 3) Lebih tertib dalam menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati untuk dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.6 Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati kepada publik atas pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun-tahun mendatang.

Penyusunan LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Data Umum Organisasi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Tantangan dan Peluang
- 1.5 Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya
- 1.6 Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis (Renstra)
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
- 3.3. Hambatan dan Rencana Aksi
- 3.4. Realisasi Anggaran
- 3.5. Inovasi dan Prestasi

BAB IV PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati selama kurun waktu satu sampai dengan empat tahun yaitu tahun 2023 – 2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan Strategik (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 – 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional baik di jajaran struktural maupun fungsional/ staf dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program, proyek dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Di samping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang mencakup tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta strategi pencapaian program akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian program target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024 berikut program dan kegiatan pendukung akan dijelaskan dalam perencanaan kinerja tahun 2024.

Dalam Perencanaan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah terdapat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator pertumbuhan produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

2. Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan ini mempunyai indikator Pertumbuhan Angka Konsumsi Makan Ikan.

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan tangkap.

2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan indikator pertumbuhan produksi perikanan budidaya.

3. Meningkatnya produksi hasil olahan ikan dengan indikator pertumbuhan produksi hasil olahan ikan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Meningkatnya produksi perikanan | Pertumbuhan Produksi Perikanan | 0,575% |
| 1 | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Pertumbuhan produksi perikanan tangkap | 0,58% |
| 2 | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Pertumbuhan produksi perikanan budidaya | 0,57% |
| B | Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan | 1,9% |
| 1 | Meningkatnya produksi hasil olahan ikan | Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan | 2,35% |

Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2024 strategi dan prioritas APBD tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan jumlah anggaran yang digunakan sebesar Rp. 17.277.916.000,00,- (tujuh belas milyar dua ratus tujuh

puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang dirinci dalam program sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

| Nama Program | Jumlah Anggaran | |
|---|------------------------|------------------|
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Rp. | 2.616.006.500,00 |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. | 4.910.013.000,00 |
| Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan | Rp. | 20.000.000,00 |
| Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp. | 150.000.000,00 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 9.581.896.500,00 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Bupati yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui Celah Kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang (Performance Improvement).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Kerangka pengukuran kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB

Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

3. Capaian Indikator Kinerja Utama, penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran skala ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023 s.d 2026 terdapat 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026

| No | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | Tahun 1 (2023) | Tahun 2 (2024) | Tahun 3 (2025) | Tahun 4 (2026) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | Tujuan | Indikator Tujuan : | | | | | |
| | Meningkatnya Produksi Perikanan | Pertumbuhan produksi perikanan (%) | 0,5 | 0,575 | 0,63 | 0,69 | 0,69 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|------|------|------|------|------|
| | Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (AKI) (%) | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| II | Sasaran | Indikator Sasaran : | | | | | |
| | Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap | Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%) | 0,5 | 0,58 | 0,65 | 0,7 | 0,7 |
| | Meningkatnya Produksi Perikanan budidaya | Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%) | 0,5 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,68 |
| | Meningkatnya Produksi hasil olahan ikan | Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan (%) | 2,19 | 2,35 | 2,37 | 2,52 | 2,52 |

Pengukuran kinerja diperlukan sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja dan menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Adapun pencapaian tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati hingga tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatnya Produksi Perikanan

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator pertumbuhan produksi perikanan. Untuk capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024

| Pertumbuhan Produksi Perikanan | |
|--------------------------------|-----------|
| Target tahun 2024 | 0,575% |
| Realisasi tahun 2024 | 8,94% |
| Capaian | 1.554,78% |

Dari Tabel 3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa target pertumbuhan produksi perikanan sebesar 0,575% sudah tercapai sebesar 5,67% yang artinya capaian indikator kinerja melebihi 100% yaitu sebesar 1.554,78%.

Produksi perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap berasal dari hasil tangkapan laut dan hasil tangkapan di perairan umum, sedangkan untuk perikanan budidaya terdiri atas budidaya tambak, budidaya kolam. Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan produksi perikanan adalah jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2024 dikurangi dengan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2023 hasilnya dibagi dengan jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2023 kemudian dikali 100%. Perhitungan secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

Formula : $([A]-[B])/[B] \times 100\%$

[A] = produksi perikanan (tangkap+budidaya) tahun 2024
 = perikanan tangkap 2024 + perikanan budidaya 2024
 = 88.658,13 ton + 46.128 ton
 = 134.786,13 ton

[B] = produksi perikanan (tangkap+budidaya) tahun 2023
 = perikanan tangkap 2023 + perikanan budidaya 2023
 = 78.240,28 ton + 45.490,26 ton
 = 123.730,54 ton

Pertumbuhan Produksi = $([A]-[B])/[B] \times 100\%$

perikanan tangkap = $\frac{(134.786,13 - 123.730,54)}{123.730,54} \times 100\%$
 = $11.055,59 / 123.730,54 \times 100\%$
 = 8,94%

Produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun budidaya sangat dipengaruhi oleh iklim. Untuk tahun 2024 realisasi mencapai 1.554,78 dikarenakan adanya pertumbuhan produksi perikanan tangkap yang tinggi dan juga pertumbuhan produksi perikanan budidaya walaupun tidak signifikan.

Tujuan 2 :
Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui indikator pertumbuhan angka konsumsi ikan. Untuk capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024

| Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (AKI) | |
|---------------------------------------|--------|
| Target tahun 2024 | 1,8% |
| Realisasi tahun 2024 | 0,19% |
| Capaian | 10,56% |

Dari Tabel 3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa target pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan sebesar 1,8% tercapai hanya sebesar 0,19% yang artinya capaian indikator kinerja belum memenuhi target yaitu hanya sebesar 10,56%.

Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Pati adalah Jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Rumus perhitungan untuk angka konsumsi ikan adalah $A+B+C$ dimana A adalah Konsumsi di rumah tangga, B adalah konsumsi luar rumah tangga, dan C adalah konsumsi tidak tercatat. Data A dan B berasal dari data BPS sedang data C berasal dari pendataan kabupaten.

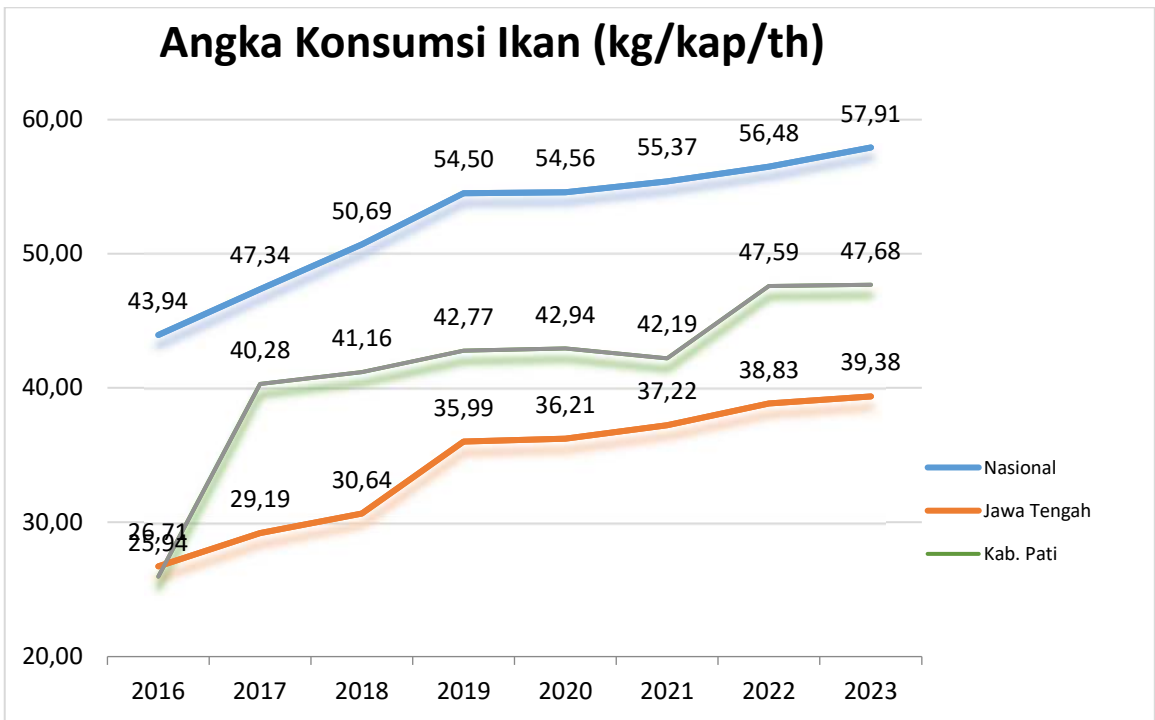
Perhitungan angka konsumsi ikan di Kabupaten Pati tahun 2023 yang dilaporkan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Angka Konsumsi Ikan (AKI) = $A+B+C$

A = Konsumsi ikan hasil data SUSENAS 2023
= 37,56

B = Konsumsi ikan di luar rumah tangga (hotel, resto, warteg, dll)
= 15,10% x nilai A
= 15,10% x 37,56 = 5,67

$C = \text{Konsumsi ikan yang tidak tercatat (luput tak terhitung)}$
 $= 10,30\% \times \text{nilai (A+B)}$
 $= 10,30\% \times (37,56+5,67) = \underline{4,45}$
 $\text{AKI Kab. Pati tahun 2023} = A+B+C$
 $= 37,56 + 5,67 + 4,45$
 $= \underline{\underline{47,68}}$



Untuk data konsumsi ikan yang disajikan memakai data tahun n-1 karena data konsumsi ikan baru akan dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di semester kedua tahun berjalan. Dalam diagram garis diatas dapat dilihat untuk Angka Konsumsi ikan di Kabupaten pati nilainya diatas pencapaian Angka Konsumsi Ikan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan di bawah pencapaian tingkat Nasional. Perlu diketahui untuk Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Pati merupakan Kabupaten dengan Angka Konsumsi Ikan tertinggi di Jawa Tengah.

Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan adalah mengurangi Angka Konsumsi Ikan tahun ini dengan Angka Konsumsi Ikan tahun lalu kemudian jumlah pengurangan dibandingkan dengan tahun lalu dikali 100%. Perhitungan secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

Formula : $([A]-[B])/[B] \times 100\%$

[A] = Angka Konsumsi Ikan (AKI) tahun 2024

[B] = Angka Konsumsi Ikan (AKI) tahun 2023

Pertumbuhan AKI = $([A]-[B])/[B] \times 100\%$

= $(47,68 - 47,59) / 47,59 \times 100\%$

= $0,09 / 47,59 \times 100\%$

= 0,19 %

Keberhasilan dari tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati “Meningkatnya Produksi Perikanan” didukung oleh dua sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan tolak ukur keberhasilan berupa peningkatan produksi tangkapan ikan di laut dan produksi tangkapan ikan di perairan umum.
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan tolak ukur keberhasilan berupa peningkatan produksi budidaya ikan air payau (tambak) dan produksi budidaya ikan air tawar (kolam).

Sedangkan keberhasilan dari tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati “Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan” didukung oleh satu sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya produksi hasil olahan ikan dengan tolak ukur keberhasilan berupa peningkatan produksi olahan ikan dengan ragam jenis diversifikasi olahan ikan.

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator pertumbuhan produksi perikanan tangkap. Untuk capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 | REALISASI TAHUN 2024 | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap | % | 0,58 | 13,32 | 2.296,55% |

Dari Tabel 3.4 diatas disimpulkan bahwa target pertumbuhan Produksi perikanan tangkap sebesar 0,58% dapat tercapai sebesar 13,32% yang artinya capaian indikator kinerja melebihi 100% yaitu sebesar 2.296,55%. Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan produksi perikanan tangkap adalah jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2024 yang terdiri dari pelabuhan (TPI Juwana 1 dan TPI Juwana 2), non pelabuhan (TPI Pecangaan, TPI Margomulyo, TPI Sambiroto, TPI Alasdowo, TPI Banyutowo, TPI Puncel) dan perairan umum darat (PUD) dikurangi dengan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023 hasilnya dibagi dengan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023 kemudian dikali 100%. Perhitungan secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

Formula : $([A]-[B])/[B] \times 100\%$

[A]

= produksi tangkap tahun 2024

= produksi tangkap pelabuhan + non pelabuhan + PUD

= 87.735,45 ton + 777,38 ton + 145,30 ton

= 88.658,13 ton

[B]

= produksi tangkap tahun 2023

= produksi tangkap pelabuhan + non pelabuhan + PUD

= 77.077,6 ton + 1.020,30 ton + 142,38 ton

= 78.240,28 ton

Pertumbuhan Produksi

= $([A]-[B])/[B] \times 100\%$

perikanan tangkap

= $(88.658,13-78.240,28)/78.240,28 \times 100\%$

= $10.417,85 / 78.240,28 \times 100\%$

= 13,32%

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya produksi perikanan budidaya

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator pertumbuhan produksi perikanan budidaya. Untuk capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 | REALISASI TAHUN 2024 | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-------------------|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Pertumbuhan Produksi perikanan budidaya | % | 0,57 | 1,40 | 245.61% |

Dari Tabel 3.5 diatas disimpulkan bahwa target pertumbuhan Produksi perikanan budidaya sebesar 0,57% dapat tercapai sebesar 1,40% yang artinya capaian indikator kinerja melebihi 100% yaitu sebesar 245.61%. Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan produksi perikanan budidaya adalah jumlah produksi budidaya perikanan air payau dan budidaya perikanan air tawar tahun 2024 dikurangi dengan jumlah produksi budidaya perikanan air payau dan budidaya perikanan air tawar tahun 2023 hasilnya dibagi dengan jumlah produksi budidaya perikanan air payau dan budidaya perikanan air tawar tahun 2023 kemudian dikali 100%. Perhitungan secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

Formula : $\frac{[A]-[B]}{[B]} \times 100\%$

[A] = produksi budidaya tahun 2024
= produksi budidaya air tawar + produksi budidaya air payau
= 12.895 ton + 33.233 ton
= 46.128 ton

[B] = produksi budidaya tahun 2023
= produksi budidaya air tawar + produksi budidaya air payau
= 12.748 ton + 32.742 ton
= 45.490 ton

Pertumbuhan Produksi = $\frac{([A]-[B])}{[B]} \times 100\%$
perikanan tangkap = $\frac{(46.128 - 45.490)}{45.490} \times 100\%$
= $\frac{638}{45.490} \times 100\%$
= 1,40%

Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya produksi hasil olahan ikan

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja pertumbuhan produksi hasil olahan ikan. Untuk capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SATUAN | TARGET TAHUN 2024 | REALISASI TAHUN 2024 | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-------------------|----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya produksi hasil olahan ikan | Pertumbuhan Produksi hasil olahan ikan | % | 2,35 | 0,71 | 30,21% |

Dari Tabel 3.6 diatas disimpulkan bahwa target pertumbuhan Produksi perikanan budidaya sebesar 2,35% dapat tercapai sebesar 0,71% yang artinya capaian indikator kinerja belum memenuhi target yaitu hanya sebesar 30,21%. Formula yang digunakan untuk perhitungan pertumbuhan produksi hasil olahan ikan adalah jumlah produksi hasil olahan ikan 2024 dikurangi dengan jumlah produksi hasil olahan ikan tahun 2023 hasilnya dibagi dengan jumlah produksi hasil olahan ikan tahun 2023 kemudian dikali 100%.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Sehingga perbandingan capaian kinerja tahun ini akan dihitung berdasarkan data series dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui trend capaian kinerja setiap indikator sasaran yang telah di capai. Pengukuran Capaian Kinerja pada masing – masing indikator kinerja sasaran merupakan kontrol untuk mengetahui efektivitas upaya pembangunan yang telah dilakukan selama periode perencanaan. Adapun perbandingan data series selama lima tahun sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Data Series Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2020 s.d 2024

| No. | Indikator Kinerja | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | produksi perikanan (ton) | 141.303,00 | 124.833,00 | 117.091,92 | 123.730,54 | 134.786,13 |
| 2. | Produksi perikanan tangkap (ton) | 94.727,00 | 78.183,00 | 71.120,29 | 78.240,28 | 88.658,13 |
| 3. | Produksi perikanan budidaya (ton) | 46.576,00 | 46.650,00 | 45.971,63 | 45.490,26 | 46.128,00 |
| 4. | Angka Konsumsi Ikan (AKI) (kg/kap/tahun) | 42.77 | 44.94 | 42.19 | 47.59 | 47.68 |
| 5. | Produksi hasil olahan ikan (ton) | 17.736.698 | 19.381.463 | 25.479.567 | 43.046.400 | 43.352.033 |

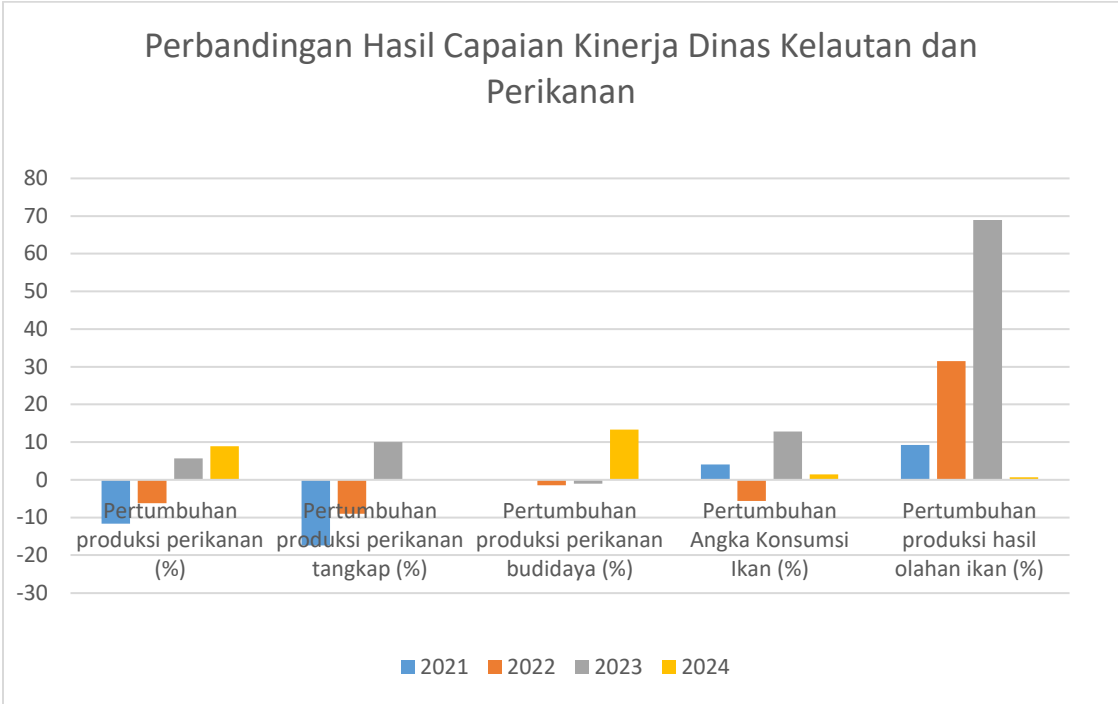
Dari tabel data series di atas dapat dihitung pertumbuhan dari masing-masing indikator kinerja sehingga dapat terlihat capaian kinerjanya. Hasil perhitungan dari masing-masing indikator dapat dilihat dalam tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.8.
Perbandingan Hasil Realisasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024

| No. | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Realisasi | | | 2024 | | |
|------------------------|--|---|-----------|-------|-------|--------|-----------|----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Target | Realisasi | Capaian |
| 1. | Meningkatnya Produksi Perikanan | Pertumbuhan produksi perikanan (%) | -11,66 | -6,20 | 5,67 | 0,575 | 8,94 | 1.554,78 |
| 2. | Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap | Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%) | -17,46 | -9,03 | 10,01 | 0,58 | 13,32 | 2.296,55 |
| 3. | Meningkatnya Produksi Perikanan budidaya | Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%) | 0,16 | -1,45 | -1,05 | 0,57 | 1,40 | 245,61 |
| 4. | Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (%) | 4,08 | -5,59 | 12,80 | 1,8 | 0,19 | 10,56 |
| 5. | Meningkatnya Produksi hasil olahan ikan | Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan (%) | 9,27 | 31,46 | 68,94 | 2,35 | 0,71 | 30,21 |
| Capaian rata-rata 2024 | | | - | - | - | - | - | 827,54 |

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun 2024 untuk mencapai 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati dengan 5 (lima) indikator kinerja utama perangkat daerah. Hasil Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2024 adalah sebesar 827,54%. Dari kelima indikator yang telah disebutkan pada tabel diatas 3 (tiga) indikator sudah mencapai target sedangkan 2 (dua) indikator belum memenuhi target.

Berikut akan dibandingkan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.



Dari grafik capaian kinerja diatas dapat dilihat jika produksi perikanan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2021 dan 2022 dan pertumbuhan positif di tahun 2023 dan tahun 2024. Produksi perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan budidaya sehingga pertumbuhan produksi perikanan mengikuti pertumbuhan perikanan tangkap dan budidaya.

Produksi perikanan tangkap laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan produksi perikanan dimana tahun 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan negatif dan di tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan produksi perikanan di tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan kedatangan ikan yang berasal wilayah bagian timur dan sisa produksi yang belum terjual di tahun sebelumnya karena harga ikan di tahun 2022 yang rendah makanya ikan baru dikeluarkan di tahun 2023 sehingga volume produksi di tahun 2023 meningkat.

Pertumbuhan produksi budidaya pertumbuhannya relatif lambat. Jumlah produksi dari tahun 2020 ke tahun ke 2023 relatif menurun walaupun penurunannya tidak signifikan. Penurunan produksi di tahun 2022 dan 2023 dikarenakan oleh pengaruh dampak elnino sehingga menyebabkan kemarau panjang dan berakibat lahan budidaya mengalami kekeringan selain itu

penurunan produksi disebabkan pula oleh sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan Dinas Kelautan dan Perikanan tidak mendapatkan kuota pupuk subsidi. Sedangkan tahun 2024 pertumbuhan produksi budidaya meningkat tajam yang dikarenakan adanya program kampung nila salin dimana di desa tersebut diprioritaskan untuk membudidayakan jenis ikan nila yang telah melewati proses salinitas. Untuk jenis ikan ini masa panennya lebih pendek daripada bandeng jadi dalam kurun waktu satu tahun jumlah produksi untuk ikan nila salin meningkat.

Pertumbuhan angka konsumsi ikan didasarkan pada tingkat konsumsi ikan penduduk terhadap olahan ikan. Pertumbuhan angka konsumsi ikan paling tinggi di tahun 2023 dan pertumbuhan angka konsumsi ikan terendah di tahun 2022. Dampak pandemi covid-19 salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat termasuk didalamnya daya beli terhadap produk hasil perikanan sehingga di tahun 2022 angka konsumsi ikan mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan dibanding dengan realisasi indikator lainnya merupakan yang tertinggi. Kenaikan produksi hasil olahan ini tidak lepas dari bertumbuhnya unit-unit pengolahan ikan dan makin beragamnya diversifikasi olahan pangan. Dahulu yang diproses untuk dijadikan produk olahan ikan hanya daging ikannya saja. Semakin majunya perkembangan zaman produk ikan yang diproses tidak hanya dagingnya saja melainkan hampir semua bagian ikan meliputi kepala, ekor, duri maupun kulit dan sisik dapat diproses untuk dijadikan produk olahan ikan yang bisa berupa abon duri, krupuk, kue kering maupun produk olahan ikan lainnya.

Terdapat 43 sub kegiatan dan 15 kegiatan urusan kelautan dan perikanan yang tercakup dalam 5 Program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati.

Program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2024 secara umum sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor;
 - d) Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan;
 - e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - f) Fasilitasi kunjungan tamu;
 - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - h) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD;
 - i) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;

- b) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
- B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - 1. Pengelolaan penangkapan ikan di Wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - a) Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 - b) Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - c) Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap.
 - 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
 - b) Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha.
 - 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - a) Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
- C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - 1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - a) Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
 - b) Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
 - 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a) Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b) Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - c) Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - d) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - e) Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
 - f) Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - g) Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- D. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 1. Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.

- a) Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota.
- E. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
 - a) Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - 2. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
 - a) Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
 - 3. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
 - a) Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

3.3. Hambatan dan Rencana Aksi

Dalam pencapaiannya ada beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memenuhi target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Tantangan dan hambatan dalam pengukuran kinerja ini diantaranya:

1. Faktor alam yang tidak dapat diprediksi, diantaranya: ketidakpastian cuaca, gelombang tinggi, kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST) dan perubahan arah angin;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana produksi perikanan, pemasaran hasil produk olahan perikanan, penangkapan ikan, dan produksi garam;
3. Penurunan kualitas lingkungan budidaya, wilayah pesisir, dan wilayah penangkapan ikan;
4. Maraknya alih fungsi lahan potensial budidaya ikan dan tambak garam untuk kegiatan non sektor perikanan;
5. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pelaku usaha sektor perikanan;

6. Belum optimalnya penerapan metode CBIB, CPIB, dan higienitas serta sanitasi dalam pengolahan produk olahan hasil perikanan;
7. Kuota pupuk bersubsidi hanya terbatas untuk lahan pertanian saja belum merambah ke lahan perikanan;
8. Perekonomian yang terpuruk di masa pandemi menyebabkan daya beli masyarakat terhadap ikan juga menurun;
9. Intervensi pemerintah yang tidak memihak pelaku usaha kelautan dan perikanan;
10. Keberagaman produk substitusi yang harganya lebih ekonomis dibanding dengan produk olahan ikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang akan dijadikan Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati antara lain :

- 1) Meningkatkan keberdayaan nelayan dengan peningkatan ketrampilan, keikutsertaan dalam asuransi nelayan, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi penangkapan ikan;
- 2) Meningkatkan daya dukung ekosistem sumberdaya perairan dan sumberdaya ikan dan diikuti dengan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- 3) Memfasilitasi nelayan dalam audiensi dengan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat;
- 4) Penerapan teknologi dan standarisasi sistem budidaya perikanan serta diversifikasi komoditas;
- 5) Keikutsertaan dalam asuransi pembudidaya;
- 6) Standarisasi sistem perbenihan untuk memenuhi kebutuhan benih ikan;
- 7) Pengelolaan lingkungan budidaya serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
- 8) Penyediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk budidaya perikanan;

- 9) Peningkatan mutu hasil olahan ikan melalui pembinaan mutu (termasuk penjaminan higienitas serta sanitasi);
- 10) Meningkatkan diversifikasi olahan hasil perikanan;
- 11) Ikut mendukung Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui sosialisasi gerakan makan ikan dengan menggandeng para pengolah ikan dan kader-kader PKK tingkat Kabupaten sampai Desa.

3.4. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan termasuk aspek akuntabilitas manajerial dengan fokus pada efisiensi pengalokasian dana pada kegiatan. Dana kegiatan ini merupakan indikator input (masukan) dari 43 sub kegiatan dan 15 kegiatan urusan kelautan dan perikanan yang tercakup dalam 5 Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan anggaran sebesar Rp. 17.277.916.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.305.984.999,00 (enam belas milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 94,37%. Dengan capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa semua kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan sangat baik.

Adapun realisasi anggaran yang terinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TOTAL ANGGARAN (Rp. 000) | REALISASI KEUANGAN (Rp. 000) | % |
|------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 3.25.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 9.581.896 | 9.130.506 | 95,29 |
| 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 76.112 | 73.388 | 96,42 |
| 3.25.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 35.000 | 33.150 | 94,71 |
| 3.25.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
| 3.25.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 13.500 | 12.626 | 93,53 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TOTAL ANGGARAN (Rp. 000) | REALISASI KEUANGAN (Rp. 000) | % |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 3.25.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.000 | 11.000 | 100,00 |
| 3.25.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.612 | 10.612 | 100,00 |
| 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5.371.448 | 5.015.592 | 93,38 |
| 3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5.217.687 | 4.861.906 | 93,18 |
| 3.25.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 57.681 | 57.607 | 99,87 |
| 3.25.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 92.080 | 92.080 | 100,00 |
| 3.25.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 44.000 | 43.463 | 98,78 |
| 3.25.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 44.000 | 43.463 | 98,78 |
| 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 241.675 | 222.325 | 91,99 |
| 3.25.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.086 | 3.086 | 100,00 |
| 3.25.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 42.150 | 41.050 | 97,39 |
| 3.25.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 97.954 | 96.114 | 98,12 |
| 3.25.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2.501 | 2.501 | 100,00 |
| 3.25.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.286 | 1.940 | 84,86 |
| 3.25.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.820 | 2.435 | 86,35 |
| 3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 86.909 | 71.230 | 81,96 |
| 3.25.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1.080 | 1.080 | 100,00 |
| 3.25.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2.889 | 2.889 | 100,00 |
| 3.25.01.2.02 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.652.019 | 3.595.946 | 98,46 |
| 301.1.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 301.1.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 138.600 | 123.103 | 88,82 |
| 301.1.08 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.512.419 | 3.471.843 | 98,84 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 196.642 | 178.811 | 90,93 |
| 301.1.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | 136.267 | 121.998 | 89,53 |
| 3.25.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 60.375 | 56.813 | 94,10 |
| 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 2.616.007 | 2.180.044 | 83,33 |
| 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, | 668.385 | 571.617 | 85,52 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TOTAL ANGGARAN (Rp. 000) | REALISASI KEUANGAN (Rp. 000) | % |
|-----------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| 3.25.03.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 3.25.03.2.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 396.000 | 299.865 | 75,72 |
| 3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | 267.385 | 266.752 | 99,76 |
| 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1.517.233 | 1.196.822 | 78,88 |
| 3.25.03.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | 266.040 | 265.715 | 99,88 |
| 3.25.03.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 1.251.193 | 931.107 | 74,42 |
| 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 430.389 | 411.605 | 95,64 |
| 3.25.03.2.03.02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 430.389 | 411.605 | 95,64 |
| 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 4.910.013 | 4.828.346 | 98,34 |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 59.000 | 58.375 | 98,94 |
| 3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 22.000 | 22.000 | 100,00 |
| 3.25.04.2.02.02 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 37.000 | 36.375 | 98,31 |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 4.851.013 | 4.769.971 | 98,30 |
| 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.170.094 | 4.110.497 | 98,57 |
| 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 216.550 | 217.344 | 99,60 |
| 3.25.04.2.04.04 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| 3.25.04.2.04.05 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | 320.369 | 318.673 | 99,47 |
| 3.25.04.2.04.06 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 21.000 | 20.932 | 99,68 |
| 3.25.04.2.04.07 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | 103.000 | 82.525 | 80,12 |
| 3.25.05 | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang | 20.000 | 20.000 | 100,00 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TOTAL ANGGARAN (Rp. 000) | REALISASI KEUANGAN (Rp. 000) | % |
|-----------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | | | |
| 3.25.05.2.01.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 3.25.06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 150.000 | 149.719 | 99,81 |
| 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 3.25.06.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 3.25.06.2.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 138.000 | 137.719 | 99,80 |
| 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 138.000 | 137.719 | 99,80 |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 7.000 | 7.000 | 100,00 |
| 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 7.000 | 7.000 | 100,00 |
| | Total | 17.277.916 | 16.305.985 | 93,37 |

3.5. Inovasi dan Prestasi

Selama tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten memperoleh beberapa Prestasi antara lain sebagai berikut :

1. Juara 1 Lomba Kreanova Pati Innovation Award 2024 dengan judul inovasi ”TAIGAN Generasi 3 (Tong Asap Ikan Gantung)”
2. Kabupaten terbaik dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kelautan Kelautan dan Perikanan Kab. Pati dalam BPH Migas Awards 2024 pada kategori Pemerintah Daerah yang Berperan Aktif Dalam Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan Serta Penyaluran Jenis BBM Tertentu Melalui Aplikasi Xstar BPH MIGAS.

3. Partisipasi dalam Indeks Inovasi Daerah dan Innovation Government Award (IGA) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dengan nama inovasi FILTAB: Media Filtrasi Sirkulasi Air Bagi Pembenihan Ikan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 merupakan hasil penilaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Secara global hasil pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2024 ditinjau dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka pada Tahun 2024 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati menunjukkan capaian kualitatif sebesar 787,54%. Hasil ini sudah melebihi target sasaran Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Renstra.

Sedangkan rincian capaian kinerja tujuan/ sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| No. | Tujuan / Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Target Tahun 2024 | Realisasi Tahun 2024 | Persentase (%) |
|-----|--|---|-------------------|----------------------|----------------|
| 1. | Meningkatnya Produksi Perikanan | Pertumbuhan produksi perikanan (%) | 0,575 | 8,94 | 1.554,78 |
| 2. | Meningkatnya Produksi Perikanan tangkap | Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%) | 0,58 | 0,19 | 10,56 |
| 3. | Meningkatnya Produksi Perikanan budidaya | Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%) | 0,57 | 13,32 | 2.196,55 |
| 4. | Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan (%) | 1,8 | 1,40 | 145,61 |
| 5. | Meningkatnya Produksi hasil olahan ikan | Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan (%) | 2,35 | 0,71 | 30,21 |

B. S A R A N

- Untuk mencapai tingkat keberhasilan pembangunan yang semaksimal mungkin maka ke depan perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan kegiatan perlu dilandasi integritas dan dedikasi yang tinggi dari aparat yang menangani sektor perikanan dan kelautan.

2. Keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan tergantung pada partisipasi seluruh bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, maka faktor kerja sama dan koordinasi diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.
3. Keberhasilan pembangunan perikanan dan kelautan juga tergantung dari sistem pelaksanaan pembangunan yang *bottom up* dengan senantiasa mempertimbangkan aspirasi dari bawah utamanya petani tambak, petani kolam, pembenih, petambak garam, bakul dan pengolah ikan dan nelayan sebagai objek pembangunan perikanan dan kelautan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.Ir. SUJARWANTO DWI ATMOKO, M.Si

Jabatan : Pj Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SUJARWANTO DWI ATMOKO, M.Si

Pihak Pertama,

TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Meningkatnya produksi perikanan | Pertumbuhan Produksi Perikanan | 0,575% |
| 1 | Meningkatnya produksi perikanan tangkap | Pertumbuhan produksi perikanan tangkap | 0,58% |
| 2 | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | Pertumbuhan produksi perikanan budidaya | 0,57% |
| B | Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan | Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan | 1,9% |
| 3 | Meningkatnya produksi hasil olahan ikan | Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan | 2,35% |

| PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|------------------------------|------------|
| 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Rp. 2.204.406.500,00 | APBDP KAB |
| | Rp. 411.600.000,00 | DAK |
| 2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. 2.469.569.000,00 | APBDP KAB |
| | Rp. 2.440.444.000,00 | DAK |
| 3 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan | Rp. 20.000.000,00 | APBDP KAB |
| 4 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp. 150.000.000,00 | APBDP KAB |
| JUMLAH | Rp. 17.277.916.000,00 | |

Pati, 10 Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN PATI


 Dr.Ir. SUJARWANTO DWI ATMOKO, M.Si


 TEGUH WIDYATMOKO, AP, M.Si